

## **Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

**Elies Herawati<sup>1</sup>, Lewi Malisan<sup>2</sup>, Anisa Kusumawardani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>1</sup>Email: [eliesherawati09@gmail.com](mailto:eliesherawati09@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [lewi.malisan@feb.unmul.ac.id](mailto:lewi.malisan@feb.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id](mailto:anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bontang. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling sebanyak 3 responden setiap SKPD yang terdiri dari kepala bagian, staff pencatatan keuangan/akuntansi dan staff pemegang kas SKPD. Analisis data menggunakan program SPSS versi 20.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; sumber daya manusia bidang akuntansi; pemanfaatan teknologi informasi

### ***The influence of human resources in accounting and the use of information technology on the quality of local government financial reports***

#### ***Abstract***

*This study aims to determine the effect of human resource accounting and utilization of information technology on the quality of financial statement of regional government Bontang. Collecting data this study used a questionnaire survey. The population in this study were 24 work units (SKPD). The sample is determined by purposive sampling method by 3 respondents each SKPD consisting head of division, recording staff finance/accounting and treasure SKPD. Data were analysed by SPSS version 20.0. The statistic methods were used to test the hypothesis was multiple linear regression. Hypothesis testing results show that the human resources accounting and utilization of information give the impact to the quality of financial statement at the Regional Government of Bontang.*

**Keywords:** *Quality of government financial statement; human resource accounting; utilization of information technology*

## PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009:2). Organisasi sektor publik diartikan juga badan usaha yang mayoritas kepemilikannya di tangan pemerintah. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama, politik dan beberapa hal lainnya.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Organisasi sektor publik juga kini diwarnai dengan munculnya tuntutan akuntabilitas atas kegiatan organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas adalah konsep etika atau pertanggungjawaban yang memuat kewajiban untuk memaparkan atau melaporkan segala tindakan atau aktivitas yang dilakukan di bidang administrasi keuangan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi 4 karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, Warisno (2008).

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Pelayanan Publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta

potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara

cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena Laporan Keuangan Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dari berbagai tulisan yang diambil dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

---

---

## Tinjauan pustaka

### Teori *stewardship* (*stewardship theory*)

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Murwaningsari (2009) Teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro (2013) juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya agar dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

### Sistem informasi akuntansi

Pengertian sistem informasi menurut Chusing (1994) dalam Azhar dan Susanto (2001) mengemukakan Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan. Sedangkan Widjajanto (2001) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah “Susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen”.

Adanya kemajuan dalam hal teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Hal ini didukung dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut maka Sistem Informasi Akuntansi menjadi suatu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan terjamin keamanannya, serta sebagai alat komunikasi antar manajemen secara tepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi berkualitas yang dibutuhkan.

### Sumber daya manusia

Matindas (2002:89) Sumber Daya Manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

Warisno (2008:48) Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dalam memahami logika akuntansi akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan pemerintah.

#### 1. Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator tingkat intelektual seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat intelektual seseorang tersebut dan dapat dengan mudah dalam melaksanakan tugas yang di embannya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik

---

---

SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan di latar belakang bidang pendidikan akuntansi dan keuangan.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pengelolaan keuangan daerah pegawai harus sering mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, karena untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah pegawai harus memahami cara dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

### Pengalaman kerja

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Semakin berpengalaman seorang pegawai dalam bidang akuntansi dan keuangan, maka semakin baik juga seorang pegawai tersebut dapat menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

### Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Indriasari & Nahartyo (2008) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tersedianya teknologi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara tepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

### Kualitas laporan keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Masmudi, 2003). Pemerintah memanfaatkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penyempurnaan kebijakan, Strategi pengembangan daerah, Perencanaan dan penganggaran daerah. Para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial- politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

#### 1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*)
- c. Tepat waktu (*timelines*)
- d. Lengkap

#### 2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada

---

---

aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

- a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)
  - b. Netral
  - c. Penyajian secara wajar/jujur (*representational/faithfulness*)
3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang di sesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## **METODE**

### **Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

### **Uji reabilitas**

Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ), yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2011).

### **Uji asumsi klasik**

#### **Uji normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dimana dalam penelitian ini digunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan bantuan *software SPSS 20.00*.

#### **Uji multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *VIF* (*Variance Inflation Factors*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).

#### **Uji heterokedastisitas**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas.

### **Analisis regresi linear berganda**

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah a: Konstanta

X<sub>1</sub>: Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi

X<sub>2</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>: koefisien korelasi

e: Kesalahan residual (error)

### **Pengujian hipotesis**

Untuk menjawab hipotesis penelitian, dilakukan beberapa pengujian yaitu uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan, dan Uji Parsial.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Variabel Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nilai signifikan Sumber Daya Manusia adalah  $0,024 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

Penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Roviyanti (2011), Windiastuti (2013) yang menghasilkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini disebabkan karena kondisi sumber daya manusia pada SKPD sudah mendukung bagi dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, rata-rata subbagian akuntansi yang bekerja pada SKPD berlatar pendidikan keuangan dan sudah mengerti mengenai keuangan pada SKPD. Dari sisi kuantitas, jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi sudah cukup banyak.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Variabel Pemanfaatan teknologi Informasi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,298, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikan pemanfaatan teknologi informasi adalah  $0,024 < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah **diterima**.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Nurillah (2014) dan Soimah (2014) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet, dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis regresi linear berganda dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama terbukti dapat diterima bahwa, sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Roviyanti (2011) dan Windiastuti (2013) yang menghasilkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan bahwa rata-rata subbagian akuntansi keuangan dan akuntansi pada SKPD sudah memahami akuntansi dan keuangan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Zuliarti (2012) yang menyimpulkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua terbukti diterima bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Nurillah (2014), dan Ariani (2015). Pemanfaatan Teknologi informasi yang meliputi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya. Keakruasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

---



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, Misda. 2015. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Samarinda)*. Skripsi Universitas Mulawarman: Samarinda
- Anthony, N., Robert dan Govindarajan. *Management Control System*. Terjemahan oleh Drs. F.X. Kurniawan Tjakrawala, M.si., Akt. 2005. Jakarta: Salemba Empat.
- Aturahman, Jami. 2015. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Balikpapan)*. Skripsi Universitas Mulawarman: Samarinda
- Azhar, La Midjan dan Susanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi I dan II*, Edisi Ke Sebelas. Bandung: Lembaga Informatika.
- BPK RI. 2014. *Penyampaian LPH BPK RI atas LKPD TA 2010, 2011, 2012 dan 2013*. <http://www.samarinda.bpk.go.id>. Diunduh pada Tanggal 01 Januari 2016.
- Donaldson, Lex dan James H. Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Stakeholders Returns*. Australian Journal of Management, Volume 16, p 49-56.
- Darwanis, Desi Dwi Mahayani. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 2 No.2 Hal. 133-151.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu SP. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Indiasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. SNA XI Pontianak.
- Johnson, Elaine B. 2007. *Contextual Teaching and Learning*. Bandung: MLC.
- Klik Bontang. 2015. *Akhirnya Laporan Keuangan Pemkot Bontang Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian*. Diakses pada tanggal 05 Januari 2016, dari (<http://www.klikbontang.com>.)
- Kalimantan News. 2011. *Bontang Targetkan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian"*. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016, dari (<http://www.kalimantan-news.com>)
- Lilrank, Paul. 2003. *"The Quality of Information"*. *International Journal of Quality & Reliability Management*. Vol 20 Iss: 6, pp.691-703.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- M. Manullang & Marihot AMH Manullang. 2001. *Manajemen Personalia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Saleba Empat.
- Murwaningsari, ETTY. 2009. *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 11, No.1, Mei 2009: 30-41.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Putro, Prima Utama Wardoyo, 2013. *Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Raharja Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Prespektif Akuntansi*. Vol.2 No.1 Juni 2007: 37-46.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
-

- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi Universitas Siliwangi: Tasikmalaya.
- Septiani, A. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang: Prespektif Teori Pengungkapan*. Thesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Soimah, Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Skripsi Universitas Bengkulu: Bengkulu.
- Sugeng, Imam. 2000. *Mengukur dan Mengelola Intellectual Capital*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 2.
- Untarry, Nurendah Ragillita. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Denga Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang
- Wahana Komputer. 2003. *Promosi Efektif dengan Web*. Semarang: Wahana Komputer
- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis Sekolah Pascasarjana USU: Medan.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Windiastruti, Ruri. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung)*. Skripsi Universitas Widyatama: Bandung.
- Wilkinson, Josep W. Et al. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. John Willey & Sons Inc: New York USA.
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)*. Skripsi Universitas Negeri Padang: 2013
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Kudus)*. Skripsi Universitas Muria Kudus: Semarang.